

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Muhammad, 1999, *Kamus Lengkap bahasa Indonesia*, Amoni, Jakarta
- Amiruddin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Anwar, Yesmil, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung
- Danial, E. dan Wasriah, N. 2009, *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung
- Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Hamzah, Andi, 2006, *Hukum Acara Pidana*, edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta
- Harahap, Yahya, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hartanti, Evi, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Hendro Hartono, Gatot, 2015, *Implementasi Pengawasan dan Audit Oleh BPK dan BPKP Di Tingkat KOD*, Lembaga Pendidikan Polri Sekolah Staf Dan Pimpinan Menengah, Lembang
- HS, Salim dan dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Huda, Ni'matul, 2003, *Politik Ketatanegaraan Indonesia (Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945)*, FH UII Press, Yogyakarta
- Kelsen, Hans, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung
- Kumorotomo, Wahyu, 2014, *Etika Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Latif, Abdul, 2014, *Hukum Administrasi (Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi)*, Prenada Media, Jakarta
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
- Makawimbang, Hernold Ferry, 2014, *Kerugian Keuangan Negara, Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta
- Manulang, Fernando, M. 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan; Tinjauan Hukum Kodrat Dan Antinomi Nilai*, Kompas, Jakarta
- Marpaung, Leden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Penemuan hukum sebuah pengantar*, Ed.II Cet.V. Liberty, Yogyakarta
- Bambang Poernomo, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Poerwadarminta, W.J.S., 2001, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Cet. 1, Hasta, Bandung
- _____, 1998, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. 3, Balai Pustaka, Jakarta.
- Rahardi, Pudi. 2014, *Hukum Kepolisian – Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Grafika, Surabaya.
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Rianto, Bibit Samad. 2006 *Pemikiran Menuju POLRI yang Profesional, Mandiri, Berwibawa, dan dicintai Rakyat*, PTIK Press dan Restu Agung, Jakarta
- Rifai, Ahmad, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, LaksBang, Yogyakarta
- Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Regka Aditama, Bandung
- Silalahi, Ulber, 2009, *Metode Penelitian Sosial*, Refika Aditama, Bandung

Soekanto, Soerjono. 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

_____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Pers, Jakarta

Soepardi, Eddy Mulyadi, 2009, *Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi, Materi Disampaikan Dalam Ceramah Ilmiah Pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor*, Bogor

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung

Utomo, Warsito Hadi. 2005, *Hukum Kepolisian Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta

Wantu, Fence M., 2011, *Idee Des Recht: Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Yuntho, Emerson. dkk, 2014, *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*, Indonesian Corruption Watch, Jakarta,

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 dan Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 dan Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4250)

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 dan Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4401s)

Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85 dan
Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4654)

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5266)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 dan
Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran
Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 144)

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017
Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, tanggal 25 Januari
2017.

Kesepakatan Bersama BPK Dengan POLRI, Nomor : 01/KB/I-XIII.2/11/2008 dan
No.Pol. : B/11/XI/2008 tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum Terhadap
Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Yang
Berindikasi Tindak Pidana.Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 04/Bua.6/Hs/SP/XII/2016, tanggal 9
Desember 2016

Risalah Rapat Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (SU MPR), Risalah
Rapat ke 3 Panitia Ad Hoc III Badan Pekerja MPR 9 Oktober 1999.

Risalah Rapat Sub Komisi C2 Ke-2 Sidang Tahunan MPR tanggal 13 Agustus
2000, Nomor Risalah: MJ.250/ST/SUB/C2/2000.

C. Karya Ilmiah, Jurnal dan Internet

Abdul Latif, 2010, *Tafsir Hakim Terhadap Unsur Melawan Hukum Pasca Putusan MK Atas Pengujian UU PTPK*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makasar.

“Jaksa Agung: Putusan MK Jadikan Pidana Korupsi Delik Materiil”, <https://news.detik.com/berita/3410935/jaksa-agung-putusan-mk-jadikan-pidana-korupsi-delik-materiil>, diakses tanggal 26/02/2017

Kelik Wardiono, 2015, *Pure Theory of Law – Hans Kelsen : Sebuah Eksplanasi dari Perspektif Basis Epistemologi*, Jurnal Fakultas Hukum UMS, Surakarta

“KPK Anggap Putusan Delik Tipikor Persulit Pemberantasan Korupsi”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt588989ab4a66c/kpk-anggap-putusan-delik-tipikor-persulit-pemberantasan-korupsi>, diakses tanggal 26/02/2017

Mada Putra Marpaung, 2008, “*Dampak Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pembatalan Penjelasan Pasa 2 Ayat 1 Undang-Undang No.31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia Khususnya Korupsi*”, Skripsi, Universitas Sumatera Utara

“Menyandera Dengan Status Tersangka, Eddy OS Hiariej”, <http://nasional.kompas.com/read/2015/01/21/14130431/Menyandera.dengan.Status>, diakses tanggal 10 September 2017

“Putusan MK Dianggap Menghambat Pemberantasan Korupsi” <http://www.pshk.or.id/id/berita/pshk-dalam-berita/putusan-mk-dianggap-menghambat-pemberantasan-korupsi/>, diakses tanggal 29 Agustus 2017

“Reformasi Birokrasi Belum Sentuh Daerah”, <https://kompas.id/baca/polhuk/2017/02/20/reformasi-birokrasi-belum-sentuh-daerah/>, diakses tanggal 26/02/2017

“SEMA 4/2016 Harus Diikuti Seluruh Hakim sebagai Pedoman tentang Kerugian Negara” <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/03/13/sema-42016-harus-diikuti-seluruh-hakim-sebagai-pedoman-tentang-kerugian-negara>, diakses tanggal 30 Agustus 2017

“Surat Edaran, ‘Kerikil’ dalam Perundang-Undangan” <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54b1f62361f81/surat-edaran--kerikil-dalam-perundang-undangan>, diakses tanggal 10 September 2017



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

**PROSPEK PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PASCA PUTUSAN MK
NOMOR 25/PUU-XIV/2016
BERUPA PENGHILANGAN FRASA KATA “DAPAT” DALAM PASAL 2 AYAT (1) DAN 3
UNDANG-UNDANG TINDAK
PIDANA KORUPSI**

MUSTIJAT PRIYAMBODO, Marcus Priyo Gunarto

Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

“Teramputasinya Hukum Anti Korupsi, Artikel Hukum : Titik Balik kemunduran Mahkamah Konstitusi RI, Saatnya MA membangkang MK sebagai Guardian of Constitution”. <http://www.hukum-hukum.com/2017/01/dalik-materiil-pidana-korupsi.html>, diakses tanggal 29/08/2017.